

# **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN RAJADESA KABUPATEN CIAMIS**

**Anri Kuriawan<sup>1)</sup>, Agus Dedi<sup>2)</sup>, Kiki Endah<sup>3)</sup>**

*Universitas Galuh Ciamis*

Email: kurniawanriak47@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Efektivitas Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitiannya adalah metode deskriptif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan serta studi lapangan berupa observasi dan wawancara kepada beberapa informan yang dianggap dapat memberikan informasi terkait Efektivitas Kebijakan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis dapat dikatakan belum optimal, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dimana masih ditemukan hambatan-hambatan baik yang bersumber dari instansi pemerintahan desa sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai atau pelaku UMKM sebagai obyek dari kebijakan tersebut.*

**Kata kunci :** *Efektivitas, Kebijakan, Peningkatan, Pemberdayaan, UMKM*

## **PENDAHULUAN**

Penyelegaraan pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memberdayakan masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, pembangunan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), karena UMKM merupakan

salah satu penggerak bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang memiliki kontribusi dalam menciptakan tenaga kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat, kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang penting untuk dicapai disuatu Negara, untuk mempercepat pembangunan ekonomi merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memberdayakan

masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran, salah satunya dengan adanya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), karena UMKM merupakan salah satu penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang memiliki kontribusi dalam menciptakan tenaga kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat.

Peran UMKM untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilihat dari, Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan usaha lokal dan pemberdayaan masyarakat dan sumber inovasi pemerintah daerah dalam mewujudkan iklim yang baik untuk UMKM belum sepenuhnya terwujud dilihat dari strategi serta penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak terhadap UMKM sehingga pelaku UMKM terhambat pada pemasaran produk serta hambatan finansial masih membatasi penentuan keputusan tingkat lokal sehingga Pemerintah Daerah belum bisa memberikan bantuan modal serta alat-alat yang dapat di gunakan oleh para pelaku-pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM mencari modal dan alat sendiri agar dapat bertahan.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UMKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan, pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya,

peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat dilakukan dengan adanya kegiatan pendampingan terhadap para pelaku UMKM yang ada di Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa, digitalisasi produk UMKM untuk memperkenalkan atau pemasaran hasil produk UMKM yang ada di Desa Tanjungsari, hal tersebut bertujuan untuk memberikan peluang yang lebih kepada para pelaku UMKM dari berbagai aspek yang harus lebih di optimalkan, kegiatan tersebut merupakan salah satu cara untuk mendukung ekonomi kretatif.

Kebijakan merupakan sebuah tindakan yang memiliki maksud dan tujuan yang dibuat oleh pemerintah, untuk dapat mengatur dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat, dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Desa Tanjungsari yang mengatur khususnya kepada masyarakat yang mempunyai usaha untuk melakukan perijinan terlebih dahulu sebelum memulai usaha, jika usahanya belum mempunyai ijin, boleh menjalankan usaha dan melakukan pemasaran akan tetapi hanya mencakup wilayah Desa Tanjungsari, tentunya dari hal tersebut menjadi salah satu potensi bagi desa untuk dapat di bina dan di kembangkan mengenai usaha mikro kecil dan menengah dengan baik, di Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa sendiri masih banyak permasalahan terkait usaha mikro dan menengah tidak terlepas dari peran Pemerintah Desa mengenai pemberdayaan masyarakat. Tentu hal tersebut menjadi suatu peringatan besar untuk Pemerintah Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa agar terus mengefektifkan program-program bersifat preventif seperti program peningkatan pemberdayaan usaha mikro

kecil dan menengah ini. Adapun indikator permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa belum optimal dalam melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah dalam peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga keberhasilan UMKM di Desa Tanjungsari belum berjalan dengan efektif, dikarenakan belum di dukung dengan adanya ketua UMKM atau patriot desa yang bertugas khusus memberikan pelayanan, sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan kepada masyarakat atau pelaku UMKM yang ada di Desa Tanjungsari.
2. Kebijakan pemerintah desa terhadap peningkatan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Tanjungsari masih belum berjalan dengan efektif, dan masih terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul dari kebijakan tersebut, contohnya kebijakan pemerintah desa yang mengharuskan para pemilik UMKM memiliki nomor induk berusaha dan diharuskan membayar pajak, akan tetapi usaha mereka masih dalam skala rumahan dengan laba yang belum tentu di dapatkan. Dalam kebijakan tersebut boleh melakukan usaha akan tetapi jika usahanya belum mempunyai ijin untuk pemasaran yang dilakukan tidak boleh keluar dari wilayah Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa.
3. Pemerintah desa belum efektif dalam memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh modal usaha, fasilitas pemasaran produk

UMKM, dan sosialisasi mengenai legalitas usaha yang dimiliki, sebagai penunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam bidang UMKM. Contohnya memberikan informasi kepada pelaku UMKM terkait adanya bantuan yang diberikan pemerintah dan juga membantu dalam proses mendapatkannya, membantu proses melakukan kredit usaha rakyat (KUR) untuk modal usaha yang dijalankan, adanya *website* desa yang dapat digunakan untuk membantu dalam proses pemasaran produk-produk usaha yang dijalankan masyarakat Desa Tanjungsari, dan adanya pembinaan atau pelatihan dasar dalam melakukan usaha yang baik.

Berdasarkan latar belakang indikator permasalahan tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis”.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, adapun rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana Efektivitas Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis?.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: Efektivitas Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **a. Pengertian Efektivitas**

Makmur (2015:5) menyatakan: “Efektivitas sesungguhnya bersumber dari salah satu kriteria ilmu administrasi yang berkembang secara alamiah ke dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang mereka kehendaki. Ketepatan harapan implementasi yang diharapkan. Maka dengan demikian efektivitas dapat kita katakana sebagai ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai”. Oleh sebab itu untuk menentukan tingkat efektivitas keberhasilan seseorang, kelompok, organisasi bahkan sampai kepada negarapun kita harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau yang dilakukan. Beni (2016: 69) menyatakan: ”Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi”. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Mardiasmo (2017:134) menyatakan: “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya”. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan

dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Sudirman (2012:31) menyatakan: “Efektif adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya”. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Kurniawan (2005:109) menyatakan: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasional kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketergantungan antara pelaksanaanya”.

### **b. Ukuran Efektivitas**

Menurut Makmur (2015:7-9) berpendapat bahwa dari segi kriteria pengukuran efektivitas, antara lain:

#### **1. Ketepatan penentuan waktu**

Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

#### **2. Ketepatan perhitungan biaya**

Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian pula sebaiknya kita tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut.

### 3. Ketepatan dalam pengukuran

Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektivitasan. Hampir semua kegiatan dimana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya, sebenarnya merupakan gambaran dari pada keefektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap manusia dalam sebuah organisasi.

### 4. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Kesalahan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidak efektifitasan serta kemungkinan menciptakan penyelesaian dikemudian hari. Sebaiknya bahwa ketepatan memilih suatu kebutuhan atau keinginan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan dalam perjalanan kehidupannya.

### 5. Ketepatan dalam berfikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektivan sehingga

kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

### 6. Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seseorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan kepada bawahan yang dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya serta akhirnya akan merugikan organisasi yang bersangkutan.

### 7. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Organisasi apapun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategis, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi yang dimiliki masyarakat tertentu.

### 8. Ketepatan sasaran

Sejalan dengan apa yang kita sebutkan di atas, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategis, sedangkan dengan sasaran lebih berorientasi kepada jangka

pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.

### c. Pengertian Kebijakan

Pengertian kebijakan menurut Makmur (2015:11) menyatakan: “Kebijakan adalah suatu bentuk keputusan yang mengikat bagi orang tertentu atau kata lain orang banyak dengan tataran strategis dan mengarah kepada yang lebih bersifat mengandung garis besarnya saja terhadap sesuatu yang dibuat oleh pemegang otoritas publik dan otoritas privat”.

Menurut Fredrich dalam Agustino (2017: 166) menyatakan: “Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Menurut Wehrich dan Koontz dalam priatna (2008:125) menyatakan bahwa: “Kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi. Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan

atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan menejer”.

Menurut Gerston (2002:14) menyatakan: “Kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintahan, karenanya tanggung jawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap tingkatan sesuai dengan kewenangannya”. Dari gambaran kondisi ini, proses pembuatan kebijakan dan berbagai pertimbangan yang meliputinya, khususnya terkait dengan tahapan perumusan kebijakan. Memberikan definisi kebijakan sebagai keputusan organisasi yang dimaksud, untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal:

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran (unit) organisasi pelaksanaan kebijakan.
2. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksanaan maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Menurut William Dunn dalam Sahya Anggara (2014:5) menjelaskan bahwa ada empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Saling kebergantungan.

Kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri,

melainkan bagian dari seluruh sistem masalah.

#### 2. Subyektifitas

Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklarifikasikan, di jelaskan, dan di evaluasi secara selektif.

#### 3. Sifat bantuan

Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan di ubah secara sosial.

#### 4. Dinamika masalah kebijakan

Cara pandang orang terhadap masalah pada akhirnya menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Empat hal tersebut menjelaskan bahwa kebijakan mengandung berbagai pertimbangan, terlebih jika menyangkut masyarakat banyak. Artinya dapat berhubungan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, dan prinsip demokrasi.

#### **d. Pengertian Pemberdayaan**

Menurut Soemantri (2010:74) menyatakan: "Pemberdayaan adalah sebagian dari pradigma pembangunan yang memfokuskan perhatian kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (sumber daya manusia) aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial". Menurut Awang (2010:74) mengatakan bahwa: "Pemberdayaan adalah memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada pihak lain atau member kemampuan dan keberdayaan".

Dengan demikian pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peroses menuju peningkatan kekuatan, kemampuan, serta menciptakan kemandirian masyarakat sehingga potensi yang dimiliki masyarakat bisa berkembang dan masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar. Jadi masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang saling berhubungan dalam satu lingkungan dan mempunyai kepentingan bersama. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya peningkatan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut makmur (2015: 228) peroses tingkat pemanfaatan atau penggunaan suatu daya atau kekuatan untuk mewujudkan tujuan yang mereka kehendaki menghasilkan 7M, lebih rincinya sebagai berikut:

##### 1. Menciptakan kemandirian

Hal ini merupakan suatu kepastian untuk memperlihatkan keberdayaan secara penuh, baik kepada pemimpin maupun orang-orang sejawatnya.

##### 2. Memiliki kegesitan

Kegesitan adalah suatu bentuk semangat kerja manusia yang selalu mencari kegiatan-kegiatan yang lebih memberikan hasil, baik ditinjau dari

segi kualitas maupun kuantitas yang akan diperolehnya.

### 3. Memiliki sikap proaktif

Proaktif yang tinggi dengan didukung oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian kemahiran dan ketepatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan merupakan salah satu modal dasar yang dapat digunakan dalam menciptakan suatu perubahan yang memberikan jaminan terjadinya keberdayaan dalam mengarungi kehidupan yang begitu sulit karena persaingan yang ketat.

### 4. Memiliki pengetahuan

Dengan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut sebenarnya menjadi dasar untuk membentuk keberdayaan manusia yang bersangkutan dalam menghadapi pergaulan dengan sesamanya maupun dengan lingkungan sekitarnya.

### 5. Memiliki keterampilan

Dengan adanya keterampilan yang dimiliki oleh manusia yang bersangkutan merupakan salah satu sumber untuk dapat menjadi manusia memiliki keberdayaan dari berbagai aktivitas yang dilakukannya.

### 6. Memiliki kepatuhan

Kepatuhan yang dimiliki oleh seseorang tentunya akan meningkatkan pemberdayaan, karena kita sadari dan mengetahui bahwa manusia atau seseorang yang tidak berdaya terhadap orang lain akan pemahaman kepatuhan bukan lagi menciptakan keberdayaan akan tetapi justru menciptakan penjajahan terhadap dirinya sendiri dari orang lain.

### 7. Memiliki akses

Dengan keaktifan untuk mengakses informasi sebenarnya merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar untuk memberdayakan diri kita masing-masing, sehingga kita dapat terhindar dari diberdayakan orang lain yang sesungguhnya kita tidak dapat melepaskan diri dari sistem yang dipersaratkan mereka.

### e. Pengertian UMKM

Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam Aufar (2014:8) menyatakan: “Usaha kecil (UK), termasuk usaha mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan”.

Menurut Bank Indonesia dalam Aufar (2014:9) menyatakan: “Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.

200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan”.

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa UMKM adalah usaha milik orang perorangan badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasan-batasan tertentu.

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang, yaitu: Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kasi Pelayanan, dan 3 orang masyarakat yang terdiri dari: Pelaku UMKM Keripik, Pelaku UMKM Anyaman, Pelaku UMKM Renggingang. Setelah data diperoleh maka dilakukan teknik pengolahan data/analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Efektivitas kebijakan pemerintah desa dalam peningkatan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis adalah dilakukan melalui 8 kriteria efektivitas menurut Makmur (2015:7-9) yaitu: ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir,

ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, ketepatan sasaran.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 8 kriteria efektivitas dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Ketepatan Penentuan Waktu**

Hasil penelitian mengenai ketepatan waktu dalam kebijakan Pemerintah Desa, bahwa ketepatan waktu dalam pelaksanaan peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memang sudah jelas di rencanakan, karena dari awal perencanaan penempatan waktu untuk kebijakan yang di khususkan untuk para pelaku usaha yang ada di Desa Tanjungsari sudah mengikuti arahan dari Dinas koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, untuk memenuhi perijinan usaha dulu sebelum usaha di jalankan dalam melaksanakan pemerosesan perijinann tidak ada batas waktu yang di tentukan.

Dari uraian jika dikaitkan dengan pendapat Edi (2007: 13) menjelaskan bahwa: Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Dengan demikian bahwa dalam pelaksanaan kebijakan dalam program peningkatan pemberdayaan UMKM perlu adanya perencanaan yang matang dengan menyamakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan tujuan tentang pelaksanaan kebijakan dalam upaya meningkatkan pemberdayaan

UMKM di desa Tanjungsari agar dapat melakukan penyusunan perencanaan waktu pelaksanaan kebijakan dalam peningkatan pemberdayaan UMKM secara tepat dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang ada di desa dan hal ini akan mempermudah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **2. Ketepatan Perhitungan Biaya**

Hasil penelitian mengenai perhitungan biaya dalam program peningkatan pemberdayaan UMKM oleh pemerintah desa dalam ketepatan pemanfaatan biaya belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, dari hasil observasi masih ditemukan program-program selain program pemberdayaan UMKM, mungkin Pemerintah Desa mengupayakan penyelesaian program-program yang masih belum rampung. Pernah ada bantuan yang di berikan pemerintah ketika pandemi berlangsung, yang dikhususkan kepada pelaku UMKM, akan tetapi dari hasil observasi di lapangan yaitu kepada para pelaku UMKM, pelak UMKM tersebut tidak tahu akan bantuan tersebut, malah yang mendapatkan bantuan tersebut masyarakat yang belum jelas usahanya atau bisa disebut memalsukan data, sehingga pemanfaatan bantuan yang digelontorkan pemerintah kepada pelaku UMKM tidak tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah Desa kepada pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut malah tidak menepatkannya.

Dari uraian di atas jika dikaitkan dengan pendapat Beni (2016:69) menyatakan bahwa: Efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga program peningkatan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

Dengan demikian bahwa dalam pelaksanaan kebijakan dalam peningkatan pemberdayaan UMKM di Desa Tanjungsari perlu adanya perencanaan perhitungan biaya yang sesuai dengan alokasi yang telah di sediakan dan dapat meminimalisir penyelewengan anggaran dana desa terhadap pelaksanaan peningkatan pemberdayaan UMKM.

## **3. Ketepatan Dalam Pengukuran**

Hasil penelitian mengenai ketepatan pengukuran dalam melaksanakan kebijakan dalam program peningkatan pemberdayaan UMKM perlu adanya ketepatan ukuran kejelasan tujuan dari kebijakan karena keberhasilan dalam melaksanakan suatu program mengacu kepada standar ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya, dari adanya peningkatan yang sudah ada sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dalam program peningkatan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh organisasi atau instansi Pemerintah Desa Tanjungsari. dalam pengukuran dalam efektivitas kebijakan pemerintah desa dalam upaya

peningkatan pemberdayaan UMKM memang sudah ada target, target dari kebijakan tersebut yaitu para pelaku UMKM yang belum memiliki ijin usaha, hasil dari target tersebut bisa dilihat dari bagaimana usaha yang dilakukan ketika sudah memenuhi kriteria usaha dan perijinannya, contoh kecilnya usaha yang dilakukan Bapak Nunung, keberhasilan usaha Bapak Nunung bisa dilihat dari produksinya yang dilakukan setiap hari, pemasarannya yang sudah semakin luas, sering jadi obyek penelitian, jadi obyek percontohan usaha mandiri. Hal tersebut ditunjukkan dalam menjalankan rencana yang telah ditentukan untuk program peningkatan pemberdayaan UMKM, kegiatan program peningkatan pemberdayaan tidak akan berhasil tanpa ada ukuran keberhasilan, ukuran keberhasilan tersebut dijadikan contoh untuk usaha-usaha yang baru merintis ataupun sudah berjalan tetapi tidak memiliki ijin usaha.

Dari uraian di atas jika dikaitkan dengan pendapat Handyaningrat (1996: 16) menyatakan bahwa: Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan demikian bahwa dalam ketepatan dalam pengukuran dengan adanya obyek pemberdayaan dan peningkatan pemberdayaan UMKM bisa dikatakan tujuan dari kebijakan dalam peningkatan pemberdayaan bisa dikatakan efektif hal tersebut diukur dari adanya kriteria UMKM yang dijadikan ukuran keberhasilan dari

kebijakan sesuai dengan teori efektivitas menurut Makmur (2015: 7).

#### **4. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan**

Hasil penelitian mengenai ketepatan dalam menentukan pilihan dalam melakukan sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program peningkatan pemberdayaan UMKM perlu mempertimbangkan terlebih dahulu siapa orang yang melakukannya apakah sudah masuk kriteria dan kompeten sehingga bisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di desa serta dapat disesuaikan dengan tujuan dari kebijakan dalam upaya peningkatan pemberdayaan UMKM. Didapat bahwasanya di desa Tanjungsari belum adanya pemilihan ketua UMKM atau sering disebut patriot desa, dari hambatan tersebut pemerintah desa mengupayakan untuk secepatnya dilakukan pemilihan patriot desa, agar supaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selaku pemilik UMKM bisa berjalan dengan efektif.

Dari uraian di atas jika dikaitkan dengan pendapat Kurniawan (2005:109) menyatakan bahwa: Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasional kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketrgantungan antara pelaksanaannya.

Dengan demikian bahwa dalam menentukan pilihan petugas dalam upaya peningkatan pemberdayaan UMKM, agar selalu memperhatikan kemampuan melaksanakan tugas pada

suatu organisasi atau sejenisnya sehingga dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat desa secara keseluruhan

### **5. Ketepatan Berfikir**

Hasil penelitian mengenai ketepatan berfikir dalam melaksanakan kegiatan organisasi perlu membangun komunikasi yang baik agar dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi dapat melakukan koordinasi secara intensif ketepatan berfikir akan melahirkan keefektivan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu akan memberikan hasil yang maksimal. pelaksanaan kerjasama memang sudah pernah dilakukan Pemerintah Desa dengan Dinas Koprasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui obyek pemberdayaan UMKM, akan tetapi kerjasama yang dilakukan belum efektif, karena dapat dilihat dari obyek pemberdayaannya masih banyak yang belum mengetahui akan kebijakan tersebut, terutama pelaku UMKM yang baru merintis usahanya.

Dari uraian diatas jika dikaitkan dengan pendapat Pamudji (1985:12) menyatakan bahwa: Kerjasama pada hakekatnya menindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dari teori diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai tujuan suatu kebijakan maka diperlukan keberhasilan dalam implementasinya, dalam implementasi dibutuhkan kerjasama yang terjalin diantara pihak-

pihak yang terlibat untuk dapat mencapai tujuan bersama-sama.

Dengan demikian dari dimensi ketepatan berfikir dalam indikator adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak dapat diketahui bahwa pada efektivitas kebijakan pemerintah desa dalam peningkatan pemberdayaan UMKM di desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa kurang optimal, hal ini dilihat dari kurangnya komunikasi antara pelaksana dengan masyarakat atau pelaku UMKM yang baru merintis terkait tujuan dari adanya kebijakan tersebut, sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat yang baru merintis usaha terkait tujuan dari kebijakan tersebut.

### **6. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah**

Hasil penelitian mengenai ketepatan dalam melakukan perintah bahwa dalam melakukan kegiatan organisasi perlu membangun komunikasi dan pendekatan yang baik dari pemerintah untuk masyarakatnya agar dalam suatu kegiatan dengan tujuan yang baik bisa menghasilkan keefektivan sebuah program dapat dilakukan dengan cara koordinasi secara intensif dan hal ini akan mempermudah mengetahui permasalahan yang terjadi di di masyarakat untuk segera di ambil solusi yang tepat, perintah yang yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sosialisasi yang dilakukan kasi pelayanan dirasa masyarakat kurang berjalan dengan efektif dikarenakan kasi pelayanan tidak

sepenuhnya melakukan pelayanan dalam satu bidang akan tetapi kasi pelayanan melakukan pendekatan bisa dikatakan secara keseluruhan sehingga upaya tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan efektif.

Dari uraian diatas jika dikaitkan dengan pendapat Ravianto dalam Masruri (2014:4) mengatakan bahwa: Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dengan demikian dalam melakukan perintah yang dilakukan perlu adanya pendekatan dan perhatian secara serius dari pemerintah desa sebagai penanggung jawab kebijakan dalam program peningkatan pemberdayaan UMKM sehingga dapat dilakukan pengawasan secara langsung, hal ini akan mempermudah terhadap pemerintah desa untuk mengefektifkan program peningkatan pemberdayaan UMKM di barengi dengan kualitas pemberi pelayanan atau perintah yang kompeten.

## **7. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan**

Hasil penelitian bahwa tujuan dalam organisasi dapat tercapai dengan mudah apabila adanya kerjasama untuk menyamakan persepsi dan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang, sehingga dapat mempermudah dalam pelaksanaannya di lapangan. dari adanya kebijakan tersebut Pemerintah Desa memiliki tujuan yang baik bagi keberlangsungan usaha yang di lakukan masyarakat, tujuan Pemerintah Desa

mensukseskan program pemerintah dalam hal perijinan usaha, perijinan usaha tersebut merupakan langkah utama dalam peningkatan pemberdayaan, jika ijin usaha yang dilakukan sudah memenuhi kriteria usaha, maka bisa di katakana usaha tersebut berhasil.

Dari uraian diatas jika dikaitkan dengan pendapat Mardiasmo (2017:134) menyatakan bahwa: Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. dapat diketahui bahwa kemampuan pelaksanaan kebijakan dalam program peningkatan pemberdayaan UMKM atau sasaran pemberdayaan akan mengakibatkan output atau hasil dari kebijakan tersebut, jika para pelaksana tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan atau program, maka besar kemungkinan efektivitas kebijakan tidak akan tercapai. Dengan demikian perlu adanya kepekaan dan perhatian secara serius dari pemerintah desa untuk mengoptimalkan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan dalam menentukan sasaran yang tepat sehingga pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi untuk jangka panjang

## **8. Ketepatan Sasaran**

Hasil penelitian bahwa untuk menetapkan sasaran perlu adanya target atau perencanaan dengan adanya perencanaan sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi yang dilakukan baik itu organisasi pemerintahan ataupun organisasi yang dilakukan masyarakat. Dalam hal ini tentunya ada sebagian masyarakat yang susah untuk diajak kerjasama dalam membangun peningkatan pemberdayaan UMKM, tetapi tidak semua masyarakat mengabaikannya masih banyak masyarakat atau pelaku UMKM yang cukup antusias dalam kegiatan ini dilihat dari capaian peningkatan usaha yang dilakukannya dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

1. Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat menurut Paslong (2010:4) menyatakan bahwa: Efektivitas pada dasarnya beasa dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya peroses kegiatan. Dengan demikian penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi, demikian pula sebaliknya, jika sasara yang ditetpkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan sebagai kegiatan itu sendiri.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas. Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Efektivitas Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, masih dikatakan belum optimal dalam pelaksanaannya hal tersebut dilihat dari capaian ketepatan dalam menentukan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan menentukan pilihan, ketepatan dalam melakukan perintah, sedangkan ada beberapa aspek yang sudah optimal diantaranya: Ketepatan dalam pengukuran dilihat dari adanya keberhasilan peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dijadikan obyek pembinaan, dan obyek percontohan usaha mandiri masyarakat, dan adanya upaya dari pemilik usaha lainnya, hal tersebut dijadikan ukuran keberhasilan sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa. Ketepatan berfikir dilihat dari adanya pemikiran yang baik dari adanya kebijakan tersebut dalam upaya peningkatan pemberdayaan UMKM, sehingga para pelaku UMKM bisa menciptakan kualitas UMKM yang baik, pemasaran yang lebih luas lagi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro,

kecil dan menengah. Ketepatan dalam menentukan tujuan dilihat dari adanya kebijakan tersebut dan sesuai arahan dari pemerintah dan Dinas Koprasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang UMKM, dan adanya capaian hasil dari kebijakan tersebut. Ketepatan sasaran dilihat dari sasaran dari kebijakan tersebut yaitu pelaku Usaha yang belum mempunyai ijin usaha, dalam ketepatan sasaran tersebut masih ada beberapa aspek yang keterkaitan dengan ketepatan sasaran yaitu sumberdaya manusianya sehingga ketepatan sasaran tersebut belum sepenuhnya optimal di laksanakan.

Efektivitas Kebijakan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis ada beberapa faktor yang menghambat pencapaian keefektifitasan kebijakan tersebut, diantaranya: Waktu pelaksanaan pemberdayaan yang belum optimal, belum adanya perincian biaya dalam program peningkatan pemberdayaan UMKM, belum dilakukannya pemilihan petugas dilapangan atau patriot desa yang memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat atau pelaku UMKM, kurangnya kejelasan perintah atau informasi yang disampaikan para pelaksana mengenai bantuan dan sosialisasi mengenai peningkatan pemberdayaan UMKM.

Untuk tercapainya Keefektifitasan Kebijakan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, perlu dilakukanya kembali proses perencanaan yang lebih baik lagi, untuk itu Pemerintah Desa mempunyai rencana untuk melakukan sosialisasi kembali mengenai kebijakan dalam program peningkatan pemberdayaan UMKM, Pemerintah Desa memberikan pelayanan bantuan dalam upaya pencairan dana, dan pelayanan dalam proses mendapatkan dana bantuan, meningkatkan kinerja sumberdaya manusianya, yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya, dan mengikuti pelatihan terhadap kemampuan aparatur desa dan juga masyarakatnya agar dapat memahami dalam penerapan system digitalisasi yang baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Makmur (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama .
- Beni pekei (2016, *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Jakarta Pusat: CV. Taushia.
- Sri Handini, MM (2019). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Umkm Wilayah*

- Pesisir, N.P., Scopindo  
Media Pustaka, (2019).
- Kurniawan, Ferry Duwi, and Luluk Fauziah. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan." *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 2.2 (2014): 165-176.
- Sentosa, Adil Makmur. "Startegi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Ukm Kota Bekasi." *Parameter* 3.2 (2018).
- Rifa'i, Bachtiar. "Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo." *Sumber* 100.100 (2013): 2-59.
- Sedyastuti, Kristina. "Analisis Pemberdayaan Ukm Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global." *Inobis: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia* 2.1 (2018): 117-127.
- Tyas, Wido Prananing, Onixtin Octarina Sianturi, And Julius Kevin Ph. "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Berbasis Rumah (Home-Based Enterprises/Hbe) Di Kota Semarang, Surakarta, Boyolali, Salatiga, Dan Surabaya." *Jurnal Pengembangan Kota* 8.1 (2020): 78-89.
- Sunariani, Ni Nyoman, AAN Oka Suryadinatha Gorda, and Ida IDM Rai Mahaputra. "Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) melalui program binaan di provinsi Bali." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 2.1 (2017): 221-236.
- Dedi, Agus. *Kajian Terhadap Eksistensi Dan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ciamis. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, (2019), 1.4: 615-624.
- Baskoro, Hanif Arif, Ansori Ansori, and Imamudin Imamudin. "Strategi Pemberdayaan Ukm Dalam Peningkatan Daya Saing Industri Besar Studi kasus (kabupaten Bangkalan)." *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*. Vol. 1. No. 1. (2016).
- Irawan, Dandan. "Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Jaringan Usaha." *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen* 11.2 (2020): 103-116.

- Ainurrofiq, Aditya Dwi. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo (Studi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo)*. Diss. Universitas Panca Marga Probolinggo, (2019).
- Maryani, Dedeh, and Ruth Roselin E. Nainggolan. *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish, (2019).
- Noor, Munawar. "Pemberdayaan masyarakat." *CIVIS* 1.2 (2011).
- Kurniawati, Dwi Pratiwi. *Pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi (studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat kota Mojokerto)*. Diss. Brawijaya University, (2013)
- Qomariah, Nurul. "Pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan “soft skill pembuatan krupuk samiler” dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga di Kabupaten Bondowoso." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks* 1.2 (2015).
- Trisnawati, Rina, Wiyadi Wiyadi, and Syamsudin Syamsudin. *Model Pemberdayaan Komunitas Usaha Mikro dan Pra Sejahtera Produktif Melalui Program ‘Daya’*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2014)
- BAWONO, Icuk Rangga. *Optimalisasi potensi desa di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia, (2019).
- ENDAH, Kiki. *Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa*. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, (2020), 6.1: 135-143.
- RAMDHANI, Abdullah; RAMDHANI, Muhammad Ali. *Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik*. *Jurnal publik*, (2017), 11.1: 1-12.